

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2008 dilaksanakan melalui proses Perumusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan dengan pendekatan kinerja melalui beberapa tahap, yaitu tahap penjangkangan aspirasi masyarakat; penentuan skala prioritas, penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan RAPBD dan penetapan/pengesahan APBD dimana dalam setiap prosesnya melibatkan *stakeholders* yang terkait. APBD Kabupaten Bantul tidak disusun oleh salah satu pihak, melainkan dirumuskan bersama sehingga produk yang dihasilkan merupakan keputusan yang akan menjadi tanggung jawab bersama dalam implementasinya. Dengan mendasarkan kenyataan tersebut, maka proses perumusan APBD Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2008 dapat penulis tarik kesimpulan akhir bahwa Proses Perumusan APBD Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2008 dengan pendekatan kinerja dan melibatkan *stakeholders* sangat efektif.

Hambatan dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Bantul adalah informasi sumber pendanaan APBD dari pemerintah pusat datangnya terlambat, konsep partisipasi masyarakat tidak dijalankan secara optimal, keterlambatan penyusunan rencana kegiatan dari masing-masing unit /dinas karena

kurangnya kualitas SDM serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RAPBD.

B. Saran

Adapun langkah-langkah kebijakan yang penulis sarankan sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan APBD perlu ditingkatkan tidak saja dalam proses Musbangdes, UDKP dan Rakorbang dan pembahasan di DPRD, namun perlu diberikan forum khusus (misalnya uji publik) sebelum RAPBD disampaikan kepada DPRD.
2. Pemerintah Kabupaten disarankan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat mengakses proses perumusan APBD dari tahap paling awal hingga penetapannya dan sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi.
3. Agar partisipasi masyarakat lebih terarah dalam proses Perumusan APBD dan memiliki relevansi dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bantul disarankan mengefektifkan sosialisasi kepada masyarakat.